

Pelanggaran ketentuan perjanjian perkawinan oleh suami yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum: analisis putusan pengadilan nomor 762/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brj Juncto Nomor 578/PDT/2017/PT.DKI = Violations of marriage agreement done by the husband which contains elements of tort: analysis decree number 762/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brj Juncto Number 578/PDT/2017/PT.DKI

Fatimah Nur Fajriyyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20494001&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Perjanjian Pernikahan adalah perjanjian tentang properti suami dan istri selama pernikahan, yang menyimpang dari prinsip atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tesis ini akan membahas bagaimana mengatur pelanggaran perjanjian pernikahan yang dibuat oleh salah satu pihak dan apakah penilaian hakim terhadap keputusan nomor 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brj juncto nomor 578 / PDT / 2017 / PT. DKI benar dan sesuai dengan unsur-unsur Undang-Undang Melanggar Hukum untuk pelanggaran Perjanjian Pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengaturan pelanggaran perjanjian pernikahan yang dibuat oleh salah satu pihak tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, dan UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam Pasal 51 bahwa pelanggaran perjanjian pernikahan dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan dan sebagai alasan perceraian. Jika diselidiki lebih lanjut, perjanjian pernikahan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Jadi, jika ada pelanggaran dalam perjanjian, itu bisa merujuk ke Buku III KUHPerdata tentang Perjanjian. Selain itu, putusan hakim dalam surat keputusan nomor 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brj juncto nomor 578 / PDT / 2017 / PT.DKI sesuai dan sesuai dengan unsur-unsur tindakan ilegal atas pelanggaran perjanjian pernikahan. Penulis menyarankan bahwa pemerintah harus mengatur pelanggaran perjanjian pernikahan secara lebih rinci untuk meminimalkan pelanggaran perjanjian pernikahan.

<hr>

A marriage agreement is an agreement about husband and wife property during a marriage, which deviates from the principle or pattern stipulated by the law. This thesis will discuss how to arrange a violation of the marriage agreement made by one of the parties and whether the judge's assessment of the decision number 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brj juncto number 578 / PDT / 2017 / PT. DKI is correct and in accordance with the elements of the Law Violating the Law for violations of the Marriage Agreement. The research method used is normative juridical, with data sources obtained through literature study and interviews. This type of research is descriptive research. Research results obtained from the regulation of violations of marriage agreements made by one of the parties are not specifically regulated in the Civil Code, and Marriage Law. In the Compilation of Islamic Law, it is stated in Article 51 that violation of the marriage agreement can be a reason for the cancellation of the marriage and as a reason for divorce. If investigated further, the marriage agreement is basically the same as the agreement in general. So, if there is a violation in the agreement, it can refer to Book III of the Civil Code on the Agreement. In addition, the judge's decision in the decision letter number 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brj juncto number 578 / PDT / 2017 /

PT.DKI is appropriate and in accordance with the elements of illegal actions for violations of the marriage agreement. The author suggests that the government should regulate violations of marriage agreements in more detail to minimize violations of marriage agreements.